**ABSTRAK**

Pokok masalah penelitian ini adalah efektivitas organisasi pada Dinas Kabupaten Sumedang rendah. Hal ini diduga disebabkan oleh Implementasi kebiajkan otonomi daerah dan kompetensi Pejabat Struktural belum dilaksanakan secara optimal, tepat, cepat dan akurat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian survey dengan *explanatory research*, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan angket sebagai alat pengumpul data yang pokok didukung obesrvasi, wawancara dan studiliteratur. Selain itu juga bahwa maksud penelitian dengan *explanatory research* adalah “menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis”.

Hasil penelitian mengungkap bahwa Implementasi kebijakan otonomi daerah dan kompetensi pejabat struktural secara empiris telah memberikan kontribusi terhadap efektivitas organisasi. Hal ini mencerminkan bahwa Implementasi kebijakan otonomi daerah dan kompetensi pejabat struktural yang berjalan dan dilaksanakan belum berjalan dengan optimal, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas organisasi.

Secara total, Implementasi kebijakan otonomi daerah dan kompetensi pejabat struktural telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas organisasi. Mengenai perbandingan besaran pengaruh, Implementasi kebijakan otonomi daerah terhadap efektivitas organisasi dan kompetensi pejabat struktural terhadap efektivitas organisasi menunjukkan bahwa pengaruh kompetensi pejabat struktural lebih besar dibandingkan dengan Implementasi kebijakan otonomi daerah.

Pengaruh dimensi-dimensi kompetensi pejabat struktural secara simultan terhadap Efektivitas organisasi adalah 37,6% dan terhadap implementasi kebijakan otonomi daerah adalah sebesar 31,1%. Sedangkan pengaruh implementasi kebijakan otonomi daerah terhadap efektivitas organisasi mencapai sebesar 55,8%.

Penelitian ini juga menemukan bahwa rendahnya kinerja organisasi tidak hanya ditentukan oleh impelemtasi kebijakan otonomi daerah dan kompetensi pejabat struktural, tetapi juga ditentukan oleh faktor lain (epsilon) sebesar 33,1%. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan efektivitas organisasi tersebut tidak bisa mengabaikan faktor lain yang tidak diteliti.

 Pengaruh parsial, kompetensi pejabat struktural telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas organisasi, sebesar 61,3 % Demikian pula, secara parsial implentasi kebijakan otonomi daerah telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas organisasi, sebesar 55,3 %.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa Implementasi kebijakan otonomi daerah dan kompetensi pejabat struktural perlu ditingkatkan, disesuaikan dengan karakteristik daerah. Selain itu bahwa faktor lain yang tidak diteliti perlu mendapat perhatian agar efektivitas organisasi Dinas Kabupaten Sumedang adanya peningkatan yang *sustenemble* sesuai dengan karakteristik daerahnya.

**Kata kunci :Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Kompetensi Pejabat Struktural, dan Efektivitas Organisasi.**

***ABSTRACT***

*TheSubject of this study is the effectiveness of the organization at the Regency Sumedang low. This is thought to be caused by the implementation of regional autonomy and competence kebiajkan Structural Officials have not implemented optimally, precise, rapid and accurate.*

*This study used survey research methods with explanatory research, ie research that takes a sample of a population and using a questionnaire as a data collection tool that supported basic obesrvasi, interviews and literature studies. In addition, the purpose of the study with explanatory research is "to explain causal relationships between variables through hypothesis testing".*

*The results revealed that the implementation of regional autonomy and competence structural empirically officials have contributed to organizational effectiveness. This reflects that the implementation of regional autonomy and competence structural officials running and running optimally implemented yet, so the effect on organizational effectiveness.*

*In total, the implementation of regional autonomy and competence structural officials have a significant influence on the effectiveness of the organization. Regarding the comparison of the amount of influence, implementation of regional autonomy on organizational effectiveness and competence of officials on the effectiveness of structural organization suggests that the effect of structural officials greater competence than the implementation of regional autonomy.*

*Effect of dimensions of competence structural officials simultaneously on organizational effectiveness is .37,6% and the implementation of regional autonomy is at 31.1%. While the effect of the implementation of regional autonomy to achieve organizational effectiveness by 55.8%.*

*The study also found that the low performance of the organization is not only determined by impelemtasi regional autonomy and competence structural officials, but also by other factors (epsilon) of 33.1%. Therefore, in order to improve the effectiveness of the organization can not ignore the other factors that were not studied.*

*Effect of partial structural competence of officials had a significant influence on the effectiveness of the organization, of 61.3% Similarly, the partial implentasi regional autonomy has a significant influence on the effectiveness of the organization, amounting to 55.3%.*

*The conclusion of this research is that the implementation of regional autonomy and competence structural officials need to be improved, tailored to regional characteristics. Besides that other factors not studied to its attention that the organizational effectiveness of District Sumedang a corresponding increasesustenembledengankarakteristik area.*

***Keywords****: Implementation of Regional Autonomy, Competence Officials Structural and Organizational Effectiveness.*

#### KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat yang telah diberikan, sehingga Disertasi ini yang berjudul : **“PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH TERHADAP KOMPETENSI PEJABAT STRUKTURAL DALAM PENINGKATAN EFEKTIVITAS ORGANISASI DINAS DI KABUPATEN SUMEDANG”** dapat diselesaikan.

Setelah selesainya penyusunan Disertasi untuk memenuhi salah satu syarat Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Sosial Bidang Kajian Utama Ilmu Administrasi Publik pada Universitas Pasundan. Dalam pelaksanaan dan penyusunan Disertasi ini, peneliti mengucapkan terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Tjahjo Sutisnawidjaja, M.S. sebagai Ketua Promotor dan Bapak Dr. H. Uyat Suyatna, M.Si. sebagai Anggota Promotor yang telah memberikan arahan, saran dan pemikiran yang memberikan wawasan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Disertasi ini.

Dalam penulisan Disertasi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak oleh karena itu, maka penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membimbing atau membantu atas kelancaran penulisan Disertasi ini terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Eddy Yusuf SP, Ir., M.Si., M.Kom., selaku Rektor Universitas Pasundan Bandung;
2. Bapak Prof. Dr. H. Didi Turmudzi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung;
3. Bapak Prof. Dr. H. Bambang Heru P., M.S, selaku Ketua Program Doktor Ilmu Sosial Bidang Kajian Utama Ilmu Administrasi Publik;
4. Bapak Prof. Dr. H. Soleh Suryadi, M.Si, selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Sosial Bidang Kajian Utama Ilmu Administrasi Publik;
5. Seluruh Dosen dan para Guru Besar atas segala bimbingan dan pengajarannya selama proses belajar mengajar dan memberi motivasi tinggi kepada peneliti dalam menyelesaikan disertasi ini. Tidak lupa staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung atas segala kebijaksanaannya, kemudahan dan bantuan lainnya selama peneliti mengikuti pendidikan;
6. Bapak Bupati Sumedang beserta jajaranya;
7. Para Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
8. Istri dan anak-anak yang telah memberikan do’a serta dukungan bagi kelancaran penulis;
9. Keluarga dan kerabat, yang dengan sabar mendukung dan membantu dengan do’a bagi kelancaran penulis;
10. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Sosial Bidang Kajian Utama Ilmu Administrasi Publik Universitas Pasundan Bandung yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis hingga dapat diselesaikannya penulisan disertasi;
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini yang telah membantu baik secara moril maupun materil sehingga disertasi ini dapat terselesaikan.

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam disertasi ini masih memerlukan penyempurnaan, oleh karena itu saran, pendapat dan kritik dari semua pihak sebagai masukan bagi penyempurnaan disertasi ini sangat penulis nantikan.

Bandung, November 2013

Peneliti,

 Holidin Sugiman

**DAFTAR ISI**

**Halaman**

**ABSTRAK i**

**ABSTRACT ii**

**KATA PENGANTAR iii**

**DAFTAR ISI vi**

**DAFTAR TABEL xii**

**DAFTAR GAMBAR xvi**

**BAB I PENDAHULUAN 1**

* 1. Latar Belakang Penelitian 1
	2. Rumusan Masalah 19
	3. Maksud dan Tujuan Penelitian 20
		1. Maksud Penelitian 20
		2. Tujuan Penelitian 20
	4. Kegunaan Penelitian 21

**BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 22**

* 1. Kajian Pustaka 22
		1. Hasil Penelitian terdahulu tentang Objek Penelitian .................................................. 24

2.1.1.1 Penelitian Asep Herwanto……………… 24

2.1.1.2 Penelitian Tactona Kusno ………….. 25

2.1.1.3 Penelitian Asep Arifin …………………. 26

2.1.1.4 Penelitian Ika Harka Yuda …………….. 27

2.1.1.5 Penelitian Suharyadi …………………… 28

2.1.1.6 Relevansi penelitian terdahulu ………… 29

* + 1. Kajian tentang Administrasi Negara sebagai Grand Theory 31
		2. Kebijakan Publik sebagai middle range theory 39
		3. Implementasi Kebijakan Publik sebagai applied Theory 47
		4. Pengertian dan Visi Otonomi Daerah 89
		5. Otonomi Daerah sebagai Problem dalam Kebijakan Publik 94
			1. Konsep Desentralisasi 94
			2. Perkembangan Peraturan tentang Otonomi Daerah di Indonesia 98
			3. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah 100
			4. Hambatan Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah 101
		6. Distribusi Urusan Pemerintahan Antar Tingkat Pemerintahan 106
		7. Pengertian Kompetensi 107
		8. Efektivitas Organisasi 122
	1. Kerangka Pemikiran 134
		1. Efektivitas Organisasi (Publik) 160
	2. Hipotesis 163

**BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 165**

* 1. Obyek Penelitia 165

3.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Sumedang 165

3.1.2.Tugas dan Fungsi Dinas-dinas di Kabupaten Sumedang...................................................... 179

3.1.3. Karakteristik Pegawai 188

* 1. Metode Penelitian ........................................................... 192
	2. Variabel Penelitian 192
		1. Paradigma Penelitian ………………………….. 193
		2. Definisi Variabel 195
		3. Populasi Penelitian 198
		4. Teknik Penarikan Sampel 200
		5. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 201
		6. Skala Pengukuran dan Instrumen Penelitian 203

3.3.6.1 Skala Pengukuran 203

3.3.6.2 Instrumen Penelitian 204

3.3.6.3 Teknik Analisis Data 206

3.3.6.4 Rancangan Pengujian Hipetesis 214

* 1. Jadwal Penelitian 215

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 216**

* 1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 216
		1. Uji Validitas 217
		2. Uji Reliabilitas Kuisioner 221
	2. Deskripsi tentang variabel penelitian 222
		1. Variabel Implementasi kebijakan Otonomi daerah 223

4.2.1.1 Dimensi Konteks Implementasi 224

4.2.1.2 Dimensi Relasi antar organisasi 228

4.2.1.3 Dimensi Sumberdaya implementasi Kebijakan 232

4.2.1.4 Dimensi karakteristik pelaksanaan

 Kebijakan 237

* + 1. Variabel Kompetensi pejabat Struktural 242
			1. Dimensi membantu dan melayani orang lain 243
			2. Dimensi kemampuan mempengaruhi dan menciptakan dampak 245
			3. Dimensi Kemampuan Kognisi 252
			4. Dimensi kemampuan efektivitas pribadi 255
		2. Variabel Efektivitas organisasi 258

4.2.3.1 Dimensi sistem organisasi 258

4.2.3.2 Dimensi struktur 261

4.2.3.3 Dimensi Strategi 264

4.2.3.4 Dimensi Gaya Kepemimpinan 268

4.2.3.5 Dimensi staf/sumberdaya 271

4.2.3.6 Dimensi keterampilan 273

4.2.3.7 Dimensi Kepemilikan Nilai 276

* 1. Perhitungan Struktur Variabel 279

4.3.1 Analisis model persamaan struktural (Structural Equation Model) 279

* 1. Hipotesis Penelitian 288

4.4.1 Hipotesis penelitian pertama : Pengaruh Implementasi Kebijakan otonomi daerah (X1) dan Kompetensi pejabat struktural (X2) terhadap Efektivitas organisasi (Y) 288

4.4.2 Hipotesis penelitian kedua : pengaruh Implementasi Kebijakan otonomi daerah (X1) terhadap Efektivitas organisasi (Y) 292

4.4.3 Hipotesis penelitian kedua : Pengaruh Kompetensi pejabat (X2) terhadap Efektivitas organisasi (Y) 294

* 1. Pembahasan Hasil Penelitian 296

4.5.1 Pelaksanaan Implemetasi Kebijakan Otonomi Daerah dan kompetensi pejabat struktural terhadap efektifvitas Organisasi Dinas di Kabupaten Sumedang 308

4.5.2 Pembahasan Secara Parsial Pengaruh Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah dan Kompetensi Pejabat Struktural terhadap Peningkatan Efektivitas Organisasi Dinas 333

 4.5.2.1 Variabel Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah 334

 4.5.2.2 Variabel Kompetensi Pejabat Struktural 371

 4.5.2.3 Variabel Efektivitas Organisasi 395

4.5.3 Pembahasan Secara Simultan Pengaruh Implenetasi Kebijakan Otonomi Daerah dan kompetensi pejabat struktural terhadap efektifvitas Organisasi Dinas di Kabupaten Sumedang 458

 4.5.3.1Pembahasan Pengaruh Implementasi kebijakan otonomi daerah dan Kompetensi pejabat struktural terhadap Efektivitas organisasi 458

 4.5.3.2 Pengaruh Implementasi kebijakan otonomi daerah terhadap Efektivitas organisasi 465

4.5.3.3 Pengaruh Kompetensi pejabat struktural terhadap Efektivitas organisasi 474

* 1. Temuan Penelitian 479
	2. Keterbatasan Penelitian 480
	3. Pengaruh lain (Epsilon) yang tidak diteliti 482

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 483**

* 1. Kesimpulan 483
	2. Saran 485

**DAFTAR PUSTAKA 488**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Rekapitulasi Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sumedang Tahun 2011 16

Tabel 1.2 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Bidang Pelayanan Perijinan Tahun2011 17

Tabel 2.1 Relevansi Hasil Penelitian Terdahulu dengan Disertasi Peneliti 29

Tabel3.1 Jumlah PNS Dinas-dinas di Kabupaten Sumedang BerdasarkanPendidikan ........................................... 189

Tabel3.2 Jumlah PNS Dinas-dinas di Kabupaten Sumedang Berdasarkan Pangkat/Golongan ................................... 190

Tabel 3.3 Jumlah PNS Dinas-dinas di Kabupaten Sumedang Berdasarkan ESELON................................................. 191

Tabel 3.4 Operasionalisasi Variabel Impelementasi Kebijakan Otonomi Daerah 196

Tabel 3.5 Operasionalisasi Variabel Kompetensi Pejabat Struktural 197

Tabel 3.6 Operasionalisasi Variabel Efektivitas Organisasi 197

Tabel 3.7 Sasaran Populasi Penelitian 199

Tabel 3.8 Penerimaan dan Penolakan Model……………………. 213

Tabel 3.9 Jadwal Kegiatan Penelitian 215

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas variabel Implementasi kebijakan Otonomi Daerah 218

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas variabel Kompetensi pejabat Struktural 219

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas variabel Y (Efektivitas Organisasi) 220

Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas Intrumen Penelitian 221

Tabel 4.5 Skor Nilai Untuk Dimensi Konteks Implementasi 224

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Untuk Dimensi Konteks Implementasi 227

Tabel 4.7 Skor Nilai Untuk Dimensi Relasi Antar organisasi 229

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Untuk Dimensi Relasi Antar Organisasi 231

Tabel 4.9 Skor Nilai Untuk Dimensi Sumberdaya Implementasi Kebijakan 233

Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Untuk Dimensi Sumber Daya Impelementasi kebijakan 235

Tabel 4.11 Skor Nilai Untuk Dimensi Karakteristik Pelaksanaan Kebijakan 238

Tabel 4.12 Distribusi Frekuensi Untuk Dimensi karakteristik Pelaksanaan Kebijakan 240

Tabel 4.13 Skor Nilai Untuk Dimensi Membantu Dan Melayani Orang Lain 243

Tabel 4.14 Distribusi Frekuensi Untuk Dimensi Membantu Dan Melayani Orang Lain 245

Tabel 4.15 Skor Nilai Untuk Dimensi Kemampuan Mempengaruhi Dan Menciptakan Dampak 246

Tabel 4.16 Distribusi Frekuensi Untuk Dimensi Kemampuan mempengaruhi Menciptakan Dampak 248

Tabel 4.17 Skor Nilai Untuk Dimensi Kemampuan Manajerial 249

Tabel 4.18 Distribusi Frekuensi Untuk Dimensi Kemampuan Manajerial 251

Tabel 4.19 Skor Nilai Untuk Dimensi Kemampuan Kognisi 253

Tabel 4.20 Distribusi Frekuensi Untuk Dimensi Kemampuan Kognisi 254

Tabel 4.21 Skor Nilai Untuk Dimensi Kemampuan Efektivitas Pribadi 255

Tabel 4.22 Distribusi Frekuensi Untuk Dimensi Kemampuan Efektivitas Pribadi ……………………………….. 257

Tabel 4.23 Skor Nilai Dimensi Sistem Organisasi 259

Tabel 4.24 Distribusi Frekuensi Dimensi System Organisasi 260

Tabel 4.25 Skor Nilai Dimensi Struktur 262

Tabel 4.26 Distribusi Frekuensi Dimensi Struktur ……………. 263

Tabel 4.27 Skor Nilai Dimensi Strategi 265

Tabel 4.28 Distribusi Frekuensi Dimensi Strategi 267

Tabel 4.29 Skor Nilai Dimensi Gaya Kepemimpinan…………… 268

Tabel 4.30 Distribusi Frekuensi Dimensi Gaya Kepemimpinan 270

Tabel 4.31 Skor Nilai Dimensi Staf/Sdm 272

Tabel 4.32 Distribusi Frekuensi Dimensi Staf/Sdm 273

Tabel 4.33 Skor Nilai Dimensi Keterampilan 274

Tabel 4.34 Distribusi Frekuensi Dimensi Keterampilan 275

Tabel 4.35 Skor Nilai Dimensi Kepemilikan Nilai 277

Tabel 4.36 Distribusi Frekuensi Dimensi Kepemilikan Nilai 278

Tabel 4.37 Ringkasan Nilai Zscore Indikator Data Penelitian 281

Tabel 4.38 Uji Kecocokan Model Sem 283

Tabel 4.39 Ringkasan Pengujian Model Pengukuran Pengaruh Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Dan Kompetensi Pejabat Strukturalterhadap Efektivitas Organisasi 285

Tabel 4.40 Ringkasan Pengujian Model Struktural Pengaruh Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Dan Kompetensi Pejabat Struktural Terhadap Efektivitas Organisasi 287

Tabel 4.41 Dekomposisi Pengaruh Antara Variabel Laten Eksogen Dengan Variabel Laten Endogen Efektivitas Organisasi 288

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Interaksi antar dimensi aktivitas dalam Implementasi kebijakan publik 9

Gambar 2.1 Landasan Alur Teorisitas Dari Grand Theory, Middle Range dan Applied Theory 23

Gambar 2.2 Bagan Proses Implementasi Kebijakan 50

Gambar 2.3 Model Proses Implementasi Kebijakan 57

Gambar 2.4 Model Grindle 64

Gambar 2.5 Model Implementasi Kebijakan Edward III 85

Gambar 2.6 Titik Pusat dan Permukaan Kompetensi……………... 116

Gambar 2.7 Hubungan antara Variabel Kausal, Intervening dan Output 127

Gambar 2.8 Model Penelitian 163

Gambar 3.1 Paradigma Penelitian 194

Gambar 3.2 Paradigma penelitian Diagram SEM 208

Gambar 3.3 Paradigma penelitian Pengaruh Secara Parsial Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah (X1) terhadap Efektivitas Organisasi (Y) 209

Gambar 3.4 Paradigma penelitian Pengaruh Secara Parsial Kompetensi Pejabat Struktural(X2) terhadap Efektivitas Organisasi (Y) 210

Gambar 4.1 Rentang nilai untuk Dimensi Konteks implementasi 226

Gambar 4.2 Rentang nilai untuk Dimensi Relasi antar organisasi 230

Gambar 4.3 Rentang nilai untuk Dimensi Sumberdaya Impelementasi Kebijakan 234

Gambar 4.4 Rentang nilai untuk Dimensi Karakteristik Pelaksanaan Kebijakan 239

Gambar 4.5 Rentang nilai untuk Dimensi Membantu dan melayani orang lain 244

Gambar 4.6 Rentang nilai untuk Dimensi Kemampuan mempengaruhi dan menciptakan dampak 247

Gambar 4.7 Rentang nilai untuk Dimensi Kemampuan Manajerial 250

Gambar 4.8 Rentang nilai untuk Dimensi Kemampuan Kognisi 253

Gambar 4.9 Rentang nilai untuk Dimensi Kemampuan efektivitas Pribadi 256

Gambar 4.10 Rentang nilai untuk Dimensi Sistem Organisasi 260

Gambar 4.11 Rentang nilai untuk Dimensi Strategi 266

Gambar 4.12 Rentang nilai untuk Dimensi Gaya kepemimpinan 269

Gambar 4.13 Rentang nilai untuk Dimensi Staf/SDM 272

Gambar 4.14 Rentang nilai untuk Dimensi Keterampilan 275

Gambar 4.15 Rentang nilai untuk Dimensi Kepemilikan nilai 277

Gambar 4.16 Diagram SEM Lengkap 289

Gambar 4.17 Model Struktur Pengaruh Variabel Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah X1 Dan Kompetensi Pejabat Struktural X2 Terhadap Efektivitas Organisasi (Y) 291

Gambar 4.18 Besarnya Pengaruh Variabel Laten Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah X1 Terhadap Variabel Efektivitas Organisasi 293

Gambar 4.22 Besarnya Pengaruh Variabel Laten Kompetensi Pejabat Struktural X2 Terhadap Variabel Efektivitas Organisasi 295